



## BUPATI KUBU RAYA

PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
NOMOR 28 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2011  
TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkan formasi jabatan Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2012, dipandang perlu melakukan penyesuaian jabatan fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yang telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011;
  - b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  3. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kubu Raya Nomor 14 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kubu Raya (Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2009 Nomor 14);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 20 Tahun 2011 tentang Penetapan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2011 Nomor 20), diubah sebagai berikut:

Lampiran mengenai Daftar Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya  
pada tanggal 10 - 10 - 2012

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
pada tanggal 15 - 10 - 2012  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK  
BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
TAHUN 2012 NOMOR 133


LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 28 TAHUN 2012  
 TENTANG  
 PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUBU RAYA  
 NOMOR 20 TAHUN 2011 TENTANG PENETAPAN  
 JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

**DAFTAR JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA**

NO	NAMA JABATAN FUNGSIONAL/ INSTANSI	NO. KEPUTUSAN/ TANGGAL	INSTANSI PEMBINA
1	2	3	4
1	Perawat	94/KEP/M.PAN/11/2001 07/11/2001	Kementerian Kesehatan
2	Dokter	139/KEP/M.PAN/11/2003 11/7/2003	Kementerian Kesehatan
3	Dokter Gigi	141/KEP/M.PAN/11/2003 11/7/2003	Kementerian Kesehatan
4	Pengawas Farmasi dan Makanan	48/KEP/M.PAN/8/2002 8/16/2002	Kementerian Kesehatan
5	Apoteker	PER/07/M.PAN/ 4/2008 4/ 15/ 2008	Kementerian Kesehatan
6	Asisten Apoteker	PER/08/M.PAN/4/2008 4/ 15/ 2008	Kementerian Kesehatan
7	Pranata Laboratorium Kesehatan	07/KEP/M.K.WASPAN/2/20002/ 7/2000 PER/08/M.PAN/3/2006 3/28/2006	Kementerian Kesehatan
8	Penyuluh Kesehatan Masyarakat	58/KEP/M.PAN/8/2002 8/14/2002	Kementerian Kesehatan
9	Epidemolog Kesehatan	17/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000	Kementerian Kesehatan
10	Entomolog Kesehatan	18/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000	Kementerian Kesehatan
11	Sanitarian	19/KEP/M.PAN/11/2000 11/30/2000 Jo.PER/10/M.PAN/3/2006 3/29/2006	Kementerian Kesehatan
12	Perawat Gigi	22/KEP/M.PAN/4/2001 4/4/2001 Jo.PER/14/M.PAN/3/2006 3/29/2006	Kementerian Kesehatan
13	Nutrisionis	23/KEP/M.PAN/4/2001 4/4/2001	Kementerian Kesehatan
14	Bidan	01/PER/M.PAN/1/2008 1/28/2008	Kementerian Kesehatan
15	Fisioterapis	KEP/04/M.PAN/1/2004 1/19/2004 Jo.PER/12/M.PAN/3/2006 3/29/2006	Kementerian Kesehatan
16	Terapis Wicara	PER/48/M.PAN/4/2005 4/21/2005	Kementerian Kesehatan
17	Teknisi Gigi	PER/06/M.PAN/4/2007 4/30/2007	Kementerian Kesehatan
18	Psikolog Klinis	PER/11/M.PAN/4/2008 5/26/2008	Kementerian Kesehatan
19	Guru	84/1993 12/24/1993	Kementerian Pendidikan Nasional
20	Pengawas Sekolah	91/KEP/M.PAN/10/2001 10/31/2001	Kementerian Pendidikan Nasional
21	Pamong Belajar	25/KEP/M.K.WASPAN/6/1999 6/18/1999	Kementerian Pendidikan Nasional
22	Penilik	15/KEP/M.PAN/3/2002 3/21/2002	Kementerian Pendidikan Nasional
23	Pengembang Teknologi Pembelajaran	PER/02/M.PAN/3/2009 3/10/2009	Kementerian Pendidikan Nasional
24	Penyuluh Kehutanan	130/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 Jo.PER/33/M.PAN/10/2006 10/12/2006	Kementerian Kehutanan
25	Polisi Kehutanan	55/KEP/M.PAN/7/2003 7/2/2003	Kementerian Kehutanan
26	Pengendali Ekosistem Hutan	54/KEP/M.PAN/7/2003 7/2/2003	Kementerian Kehutanan
27	Penggerak Swadaya Masyarakat	KEP/58/M.PAN/6/2004 6/14/2004	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
28	Pengantar Kerja	06/KEP/M.K.WASPAN/2/2000 2/7/2000	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
29	Perantara Hubungan Industrial	40/KEP/M.PAN/12/2000 12/22/2000	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
30	Mediator Hubungan Industrial	PER/06/M.PAN/4/2009 4/27/2009	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
31	Pengawas Ketenagakerjaan	35/KEP/M.PAN/3/2003 3/28/2003	Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
32	Pekerja Sosial	03/M.PAN/1/2004 1/26/2004	Kementerian Sosial

1	2	3	4
33	Penyuluh Sosial	PER/06/M.PAN/4/2008 4/9/2008	Kementerian Sosial
34	Penguji Mutu Barang	131/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 KEP/05/M.PAN/1/2005 1/13/2005	Kementerian Perdagangan
35	Penera	128/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 KEP/03/M.PAN/1/2005 38365	Kementerian Perdagangan
36	Penyuluh Perindag	129/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002 Jo.KEP/04/M.PAN/1/2005 1/13/2005	Kementerian Perdagangan
37	Penyuluh Pertanian	PER/02/M.PAN/2/2008 2/18/2008	Kementerian Pertanian
38	Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	56/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 9/30/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/9/2004 9/30/2004	Kementerian Pertanian
39	Pengawas Benih Tanaman	57/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 9/30/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/9/2004 9/30/2004	Kementerian Pertanian
40	Medik Veteriner	59/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 9/30/1999	Kementerian Pertanian
41	Paramedik Veteriner	60/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 9/30/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/9/2004 9/30/2004	Kementerian Pertanian
42	Pengawas Bibit Ternak	61/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 9/30/1999 Jo.KEP/137/M.PAN/9/2004 9/30/2004	Kementerian Pertanian
43	Pengawas Mutu Pakan	KEP/31/M.PAN/3/2004 3/18/2004	Kementerian Pertanian
44	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	PER/17/M.PAN/12/2006 4/11/2006	Kementerian Pertanian
45	Pengendali Hama dan Penyakit Ikan	36/KEP/M.PAN/5/2001 5/25/2001 Jo.PER/51M.PAN/4/2005 4/27/2005	Kementerian Kelautan dan Perikanan
46	Pengawas Benih Ikan	37/KEP/M.PAN/5/2001 5/25/2001 Jo.PER/52/M.PAN/4/2005 4/27/2005	Kementerian Kelautan dan Perikanan
47	Pengawas Perikanan	35/KEP/M.PAN/5/2001 5/25/2001 Jo.PER/50/M.PAN/4/2005 4/27/2005	Kementerian Kelautan dan Perikanan
48	Penyuluh Perikanan	PER/19/M.PAN/10/2008	Kementerian Kelautan dan Perikanan
49	Pengawas Keselamatan Pelayaran	KEP/195/M.PAN/12/2004 12/10/2004	Kementerian Perhubungan
50	Penguji Kendaraan Bermotor	150/KEP/M.PAN/11/2003 11/21/2003	Kementerian Perhubungan
51	Inspektur Tambang	22/KEP/M.PAN/4/2002 4/19/2002	Kementerian Energi dan SDM
52	Penilai Pajak Bumi dan Bangunan	30/KEP/M.PAN/3/2002 12/7/2002	Kementerian Keuangan
53	Penyuluh Pajak	PER/04/M.PAN/2/2006 2/28/2006	Kementerian Keuangan
54	Pamong Budaya	62/KEP/M.K.WASPAN/9/1999 9/30/1999	Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata
55	Kataloger	PER/07/M.PAN/5/2007 5/30/2007	Kementerian Pertahanan
56	Penata Ruang	PER/10/M.PAN/6/2007 6/18/2007	Kementerian Pekerjaan Umum
57	Perancang Peraturan Perundang-undangan	41/KEP/M.PAN/12/2000 12/22/2000	Kementerian Hukum dan HAM
58	Teknik Pengairan	63/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	Kementerian Pekerjaan Umum
59	Teknik Jalan dan Jembatan	64/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	Kementerian Pekerjaan Umum
60	Teknik Tata Bangunan dan Perumahan	65/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	Kementerian Pekerjaan Umum
61	Teknik Penyehatan Lingkungan	66/KEP/M.K.WASPAN/10/1999 10/1/1999	Kementerian Pekerjaan Umum
62	Pranata Komputer	66/KEP/M.PAN/7/2003 7/17/2003	Badan Pusat Statistik
63	Statistisi	37/KEP/M.PAN/4/2003 4/7/2003	Badan Pusat Statistik
64	Pengendali Dampak Lingkungan	47/KEP/M.PAN/8/2002 8/16/2002	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
65	Pengawas Lingkungan Hidup	PERMENPAN NO.39 TAHUN 2011	Kementerian Negara Lingkungan Hidup
66	Penerjemah	PER/24/M.PAN/5/2006 5/19/2006	Sekretariat Negara
67	Analisis Kepegawaian	PER/36/M.PAN/11/2006 11/15/2006	Badan Kepegawaian Negara
68	Auditor	19/1996 5/2/1996 Jo.PER/220/M.PAN/7/2008	BPK dan BPKP
69	Arsiparis	09/KEP/M.PAN/2/2003 2/1/2003 Jo.KEP/34/M.PAN/3/2004 3/25/2004	Arsip Nasional Republik Indonesia
70	Pustakawan	132/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002	Perpustakaan Nasional
71	Penyuluh Keluarga Berencana	KEP/120/M.PAN/9/2004 9/2/2004	BKKBN

1	2	3	4
72	Perencana	16/KEP/M.PAN/3/2001 3/19/2001	BAPPENAS
73	Surveyor Pemetaan	134/KEP/M.PAN/12/2002 12/3/2002	Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional
74	Operator Transmisi Sandi	133/KEP/M.PAN/11/2003 11/3/2003	Lembaga Sandi Negara
75	Sandiman	134/KEP/M.PAN/11/2003 11/3/2004	Lembaga Sandi Negara
76	Pranata Hubungan Masyarakat	PER/109/M.PAN/11/2005 11/1/2005	Lembaga Informasi Nasional
77	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah di Daerah	PERMENPAN NO.15/TAHUN 2009 Peraturan Bersama MENDAGRI dari Kepala BKN NO.22 TAHUN 2010 dan NOMOR 03 TAHUN 2010	Kementerian Dalam Negeri


 BUPATI KUBU RAYA,  
 MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya  
 pada tanggal 15-10-2012  
 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
  
 HUSEIN SYAUWIK  
 BERITA DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA  
 TAHUN 2012 NOMOR 132